

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Sejak awal kebangkitan Partai Komunis Indonesia pada tahun 1950 masehi, Partai Komunis Indonesia merubah pola politik dari ekstrim (paling tinggi, paling keras, sangat keras, teguh dan fanatik)¹ kepada politik kerjasama (gotong royong). PKI merasakan banyak pihak yang terus merasa curiga terhadap PKI. Karena itu PKI membina kerjasama dengan salah satu partai besar yang tidak memusuhinya yaitu kelompok Nasionalis PNI (Partai Nasional Indonesia). PKI menyadari kerjasama ini menguntungkan PNI, tetapi bagi PKI yang terpenting bahwa kebijaksanaan pemerintah Indonesia tidak merugikan perjuangan PKI. Sampai tahun 1965 semua kekuatan politik dapat dibungkam PKI. Walaupun ada partai yang anti PKI, lawan Parnpol tidak berani lagi menyuarakan aspirasinya. Siasat PKI menghancurkan partai-partai politik dilakukan sebagai berikut:

- 1) Merangkul partai politik tertentu supaya mau menerima atau mendukung politik PKI, atau minimal tidak menghalangi politik PKI.
- 2) Melakukan isolasi politik terhadap partai-partai atau kekuatan yang menentangnya. Partai atau kekuatan tersebut dipojokkan dengan berbagai tuduhan dan fitnahan, sampai akhirnya dibubarkan (BPS atau Badan Pusat Statistik, Manikebu atau Manifes kebudayaan, Murba atau Partai Musyawarah Rakyat Banyak).

¹<https://kbbi.web.id> 6 Agustus 2022 pukul 23.24

- 3) Melakukan infiltrasi ke dalam tubuh partai serta kekuatan tertentu. PKI menyusupkan kader-kadernya ke dalam tubuh partai dan organisasi tertentu, dan dengan kelihaiannya dapat mengadu domba antara pimpinan maupun antar anggota. Dengan demikian kader PKI dapat menguasai pimpinan partai atau organisasi itu untuk menjadi satelit PKI.
- 4) Melakukan isolasi secara fisik. Ini ditujukan kepada 7 Jenderal yang oleh PKI disebut “kepala batu”, tidak mau tunduk pada keinginannya. Kepada 7 Jenderal yang dianggap kepala batu, PKI tidak segan melakukan tindakan kekerasan, teror sampai kepada pembunuhan.²

Gerakan 30 September atau sering disingkat G 30 S PKI, Gestapu (Gerakan September Tiga Puluh), Gestok (Gerakan Satu Oktober) adalah sebuah peristiwa yang terjadi pada tanggal 30 September tahun 1965 masehi dimana enam pejabat tinggi militer Indonesia beserta beberapa orang lainnya dibunuh dalam suatu usaha pemberontakan yang disebut sebagai usaha kudeta yang dituduhkan kepada anggota Partai Komunis Indonesia Pasca Gerakan 30 September 1965. Salah satu kenyataan sejarah yang tidak mungkin dipungkiri ialah terjadinya aksi pembersihan besar-besaran terhadap kaum komunis, khususnya di Jawa Timur, Jawa Tengah, dan Bali oleh umat anti komunis, baik dari kalangan Islam maupun Hindu Bali. Dengan ditangkapnya para pelaku penculikan dan pembunuhan yang kemudian diserahkan kepada Kostrad/Kopkamtib dan kesaksian Sukitman dalam menemukan lokasi Sumur Lubang Buaya sebagai

² Pamudjo, *Komunisme di Indonesia jilid IV Pemberontakan G30 S/PKI dan Penumpasannya* (Jakarta: Pusjarah TNI, 2009), hlm 179-181

tempat penguburan jenazah-jenazah para Jendral, telah memberikan petunjuk kuat terlibatnya PKI dalam peristiwa G/30/S 1965.³

Pada tanggal 14 dan 17 Januari tahun 1965 masehi, D.N. Aidit di dalam sidang Front Nasional menegaskan perlunya mempersenjatai masa untuk menghadapi Nekolim (Neokolonialisme-Kolonialisme-Imperialisme). Tuntutan PKI itu datangnya dari semua kekuatan politik yang ada pada waktu itu, melalui suatu pernyataan yang disebut “Kebulatan Tekad” dan “Instruksi Bersama antara Pengurus Front Nasional dengan Pimpinan Partai-partai Politik, Pengurus Organisasi Massa dan Golongan Karya” pada tanggal 17 Januari 1965. Dalam hal ini D.N. Aidit menyatakan bahwa tidak kurang dari 5 juta orang buruh dan 10 juta petani yang terorganisasi sudah siap untuk berjuang dengan mengangkat senjata.⁴

Adapun Kebulatan Tekad tersebut berbunyi antara lain: “Menyerukan dan mendesak Pemerintah dan alat-alatnya yang berwenang untuk segera melatih dan mempersenjatai sokoguru-sokoguru revolusi, sebagai jaminan utama guna mencegah dan mengalahkan tiap bentuk agresi Inggris dan agresi Nekolim pada umumnya.”⁵

Selanjutnya Letjen Ahmad Yani secara tegas menyatakan ketidak setujuannya atas usul D.N. Aidit perihal pembentukan Angkatan ke V untuk mewujudkan sistem Komunis di Indonesia. PKI menetapkan strategi politik. Pada kongres V yang diselenggarakan pada

³ Ketut Sadana Arta, I Ketut Margi. *Sejarah Indonesia* (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2014), hlm 149-150

⁴ Ketut Sadana Arta, I Ketut Margi. *Sejarah Indonesia* (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2014), hlm 150

⁵ Sudharmono, *30 Tahun Indonesia Merdeka 1965-1973* (Jakarta: PT. Citra Lamtoro Gung Persada, 1975), hlm 19-20

tahun 1954 masehi, Strategi politik itu disebut dengan Metode Kombinasi Tiga Bentuk Perjuangan (MKTBP). Ahmad Yani berpendapat bahwa pembentukan angkatan ke V seperti digagaskan Oleh Ketua CC PKI itu tidak efisien, karena telah dibentuk pula Pertahanan Sipil (HANSIP) yang mampu menampung semacam laskar-laskar bahkan dilingkungan perguruan tinggi juga telah dibentuk Resimen Mahasiswa (Menwa). Namun AURI (Angkatan Udara Republik Indonesia) justru menyambut baik gagasan pembentukan angkatan ke V.⁶

Dalam rapat Polit Biro pada awal Bulan Mei tahun 1965 masehi, D.N. Aidit menyatakan bahwa kaum “Kapitalis Birokrat” (pimpinan tentara yang memegang jabatan tertentu) sedang mempersiapkan suatu kudeta. Menurut Supono Marsudidjojo, Dewan Jendral itu terdiri dari Jendral A.H. Nasution, Ahmad Yani, Letnan Jendral Anumerta Suprpto, Ahmad Sukendro, dan Siswondo Parman. Sedangkan Mas Tirto Harjono, Sutojo Siswomiharjo, dan Donald Isaac Pandjaitan dianggap tidak loyal kepada Presiden Soekarno dan memiliki sifat anti komunis yang fanatik. Menurut Sjam Kamaruzzamn, D.N. Aidit meluncurkan konsep Dewan Jendral untuk pertama kalinya pada Bulan April tahun 1965 masehi.

D.N. Aidit selaku Ketua CC PKI, di dalam diskusi dan rapat-rapat resmi Politbiro, selalu menggambarkan, menegaskan bahwa di percaya “Dewan Jenderal” tersebut benar-benar ada dan merupakan kelompok Jenderal TNI-AD yang menjadi musuh PKI. Oleh karena itu isu tentang adanya “Dewan Jenderal” tersebut oleh Politbiro CC PKI

⁶ Ketut Sadana Arta, I Ketut Margi. *Sejarah Indonesia* (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2014), hlm 150-151

diperlakukan sebagai informasi dan dijadikan dasar dalam menentukan langkah-langkah kebijaksanaan yang diambil. Untuk kepentingan keluar, isu Dewan Jenderal terus diintensifkan dalam bentuk desas-desus yang mendiskreditkan pimpinan TNI-AD, dengan menyebutkannya seolah-olah Dewan Jenderal adalah kelompok Perwira Tinggi TNI-AD yang tidak loyal ke pada Presiden Soekarno dan mempunyai kegiatan politik menilai kebijaksanaan Presiden Soekarno.⁷

Biro Khusus mengembangkan terus isu Dewan Jenderal tersebut sehingga mencapai bentuk yang akhirnya dapat diterima oleh pihak luar atau masyarakat sebagai sesuatu yang seolah-olah benar-benar ada, terutama oleh Presiden Soekarno. Penyebarluasan isu dilakukan melalui berbagai saluran-saluran. Penyebarluasan isu ke daerah, di samping melalui Biro Khusus, dilaksanakan pula melalui CDB atau Committee Daerah Besar. Penyebarluasan isu ke dalam lembaga resmi, seperti DPR, DPA, Front Nasional, dan sebagainya, dilakukan melalui fraksi-fraksi PKI di dalam lembaga-lembaga tersebut. Organisasi-organisasi yang bernaung di bawah PKI di dimanfaatkan pula sebagai corong untuk menyebarluaskan isu Dewan Jenderal ke dalam masyarakat.⁸

Pasca Gerakan 30 September 1965 situasi perpolitikan Indonesia menjadi kacau balau. Unjuk rasa di setiap daerah meningkat menuntut dibubarkannya PKI dan diadilinya para-para tokoh PKI yang terlibat dalam usaha kudeta pengambilalihan kekuasaan Presiden Soekarno tersebut. Di minggu terakhir Bulan September tahun 1965

⁷ Moerdiono, *Gerakan 30 September Pemberontakan Partai Komunis Indonesia* (Jakarta: Pt. Ghalia Indonesia, 1994), hlm 61-62

⁸ Moerdiono, *Gerakan 30 September Pemberontakan Partai Komunis Indonesia* (Jakarta: Pt. Ghalia Indonesia, 1994), hlm 62

masehi, suasana di Bandung tidak menunjukkan adanya gejala akan pecahnya peristiwa G30S. Ketika Tragedi tanggal 30 September 1965 masehi masyarakat Bandung belum mengetahui apa yang sedang berlangsung di ibu kota Jakarta. Gubernur Jawa Barat, Mashudi yang juga merangkap sebagai anggota MPRS, sedang berada di Beijing. Hal ini menunjukkan bahwa hubungan pejabat pemerintahan Indonesia saat itu cukup dekat dengan Cina. Berbeda dengan kondisi politik di Jawa Tengah dan Jawa Timur, di Jawa Barat boleh dikatakan tidak ada peristiwa main hakim sendiri. Gubernur Mashudi dan panglima Ibrahim Adjie melakukan gerak cepat mengantisipasi keadaan agar tidak terjadi kebentrokan massa akan pembubaran Partai Komunis Indonesia. Kodam Siliwangi ternyata bersih dari penyusupan PKI ketika G30S pecah. Dengan begitu Siliwangi tidak menghadapi gejolak seperti yang terjadi di Kodam Diponegoro (Jawa Tengah) dan Kodam Brawijaya (Jawa Timur).⁹

Pada tanggal 3 Oktober tahun 1965 masehi, Nahdlatul Ulama dengan resmi menyatakan diri bergandengan tangan dengan TNI-AD untuk memulihkan keamanan dan menjaga keutuhan Bangsa Indonesia. Itulah sebabnya Jama'ah Nahdlatul Ulama mulai mengantisipasi aksi-aksi PKI di pusat dan daerah. Maka sejak tanggal 7 Oktober tahun 1965 kalangan Nahdlatul Ulama mulai menggerakkan barisan untuk membasmi PKI. Puncaknya ialah ketika dilakukan pembasmian terhadap orang-orang yang terindikasi sebagai pimpinan, anggota,

⁹ Taufik Abdullah, Sukri Abdurrahchman, Restu Gunawan, *Malam Bencana 1965 dalam Belitan Krisis Nasional Bagian II Konflik Lokal* (Jakarta: Yayasan Pustaka Obor Indonesia, 2012) hlm 68-72

simpatisan PKI. Aksi-aksi itu dimulai sejak Bulan Oktober sampai akhir Bulan November tahun 1965 masehi.¹⁰

Isu PKI sebagai aktor utama Gerakan 30 September yang dikembangkan Jendral Besar TNI H.M. Soeharto ternyata mampu menumbuhkan simpati dan dukungan kuat masyarakat terhadap gerakan penumpasan yang dipimpinnya. Oleh karenanya tidak mengherankan, apabila dalam waktu relatif singkat, gerakan penumpasan PKI oleh Letnan Jenderal TNI H.M Soeharto segera diikuti oleh aksi-aksi demonstrasi yang mengutuk PKI. Bahkan, lewat pernyataannya yang sangat berani, hampir bersamaan dengan saat berlangsungnya upacara pemakaman para Jenderal korban penculikan pada tanggal 5 Oktober 1965, Nahdlatul Ulama mengeluarkan tuntutan pembubaran PKI. Tuntutan pembubaran PKI kemudian disuarakan lebih tegas lagi oleh Kesatuan Aksi Pengganyangan Gerakan 30 September (KAP-Gestapu) dalam rapat umum keduanya pada tanggal 8 Oktober tahun 1965 masehi. KAP-Gestapu juga menuntut pula pembersihan kabinet, parlemen, MPRS, dan semua lembaga-lembaga negara dari unsur-unsur komunis dan simpatisannya.¹¹

Pembunuhan keenam Jenderal pada tanggal 1 Oktober 1965 diikuti oleh serangkaian perkembangan dan memuncak berhentinya Presiden Soekarno dari jabatan Presidennya satu setengah tahun kemudian tepat tanggal 20 Februari 1967. Hancurnya sistem demokrasi terpimpin telah dapat dibayangkan pada tanggal 1 Oktober 1965 ketika

¹⁰ Taufik Abdullah, Sukri Abdurrahchman, Restu Gunawan, *Malam Bencana 1965 dalam Belitan Krisis Nasional Bagian II Konflik Lokal* (Jakarta: Yayasan Pustaka Obor Indonesia, 2012) hlm xxvii

¹¹ Taufik Abdullah, Sukri Abdurrahchman, Restu Gunawan, *Malam Bencana 1965 dalam Belitan Krisis Nasional Bagian II Konflik Lokal* (Jakarta: Yayasan Pustaka Obor Indonesia, 2012) hlm 53

Letnan Jenderal TNI H.M Soeharto yang didukung oleh para Jenderal senior lain (Ahmad Yani, Mayjen Umar Wirahadikusumah) tidak sejalan dengan pandangan Presiden Soekarno. Lenyapnya PKI salah satu kekuatan politik yang efektif dalam 3 bulan terakhir tahun 1965. Pembunuhan-pembunuhan yang terjadi di Jawa Tengah (Bulan Oktober tahun 1965), Jawa Timur (Bulan November tahun 1965), dan Bali (Bulan Desember tahun 1965-1966). Berapa jumlah orang yang dibantai tidak diketahui dengan persis, namun perkiraan yang konservatif menyebutkan 500.000 orang, sementara perkiraan lain menyebut dua sampai tiga juta orang. Namun diduga setidaknya-tidaknnya satu juta orang menjadi korban dalam bencana enam bulan yang mengikuti kudeta itu pengambilalihan kekuasaan Presiden Soekarno.¹²

Pada 1 Oktober 1965, upaya awal para pemimpin senior Nahdlatul Ulama adalah mencari informasi mengenai peculikan Enam Jenderal Angkatan Darat. Para Jenderal ini Jenderal Ahmad Yani, Letjen Jenderal TNI Anumerta R. Suprpto, Letjen Siswondo Parman, Letjen Mas Tirtodarmo Haryono, Mayor Jenderal Donald Isaac Pandjaitan, dan Mayor Jenderal TNI Anumerta Sutoyo Siswomiharjo. Kemudian diketahui ditemukan telah terbunuh. Pada saat itu, meningkatnya persaingan antara Angkatan Darat dan PKI sudah sangat jelas dimata semua orang.

5 Oktober 1965, Pengurus Besar Nahdlatul Ulama, di Jakarta mengeluarkan “Resolusi Mengutuk Gestapu”, suatu surat pernyataan yang berisi sikap resmi Nahdlatul Ulama menanggapi G30S

¹² Ketut Sedana Arta, I Ketut Margi. *Sejarah Indonesia* (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2014), hlm 160.

PKI.¹³ Keputusan akhirnya diambil (untuk memilih Subchan Zaenuri Echsan menjadi pemimpin), yaitu para pemimpin Nahdlatul Ulama harus bersembunyi. Sementara itu, mandat kepemimpinan diberikan kepada Subchan Zaenuri Echsan sebagai wakil Ketua IV Nahdlatul Ulama.¹⁴

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan Latar Belakang Masalah tersebut diatas penulis dapat merumuskan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana Riwayat Hidup Subchan Zaenuri Echsan?
2. Bagaimana Pemberontakan PKI di Jakarta Tahun 1965-1970?
3. Bagaimana Kontribusi Subchan Zaenuri Echsan Dalam Menumpas Pemberontakan PKI di Jakarta Tahun 1965-1970?

C. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan penelitian ini adalah untuk terwujudnya deskripsi yang menerangkan tentang:

1. Riwayat Hidup Subchan Zaenuri Echsan.
2. Pemberontakan PKI di Jakarta Tahun 1965-1970.
3. Kontribusi Subchan Zaenuri Echsan Dalam Menumpas Pemberontakan PKI di Jakarta Tahun 1965-1970.

D. Kajian Pustaka

Kajian pustaka memuat uraian tentang kajian literatur yang mendasari gagasan untuk menyelesaikan masalah. Kajian ini juga

¹³<https://Islambergerak.com> Muhammad Al-Fayyadl 19 September 2021

¹⁴ Greg Barton, Greg Fealy. *Tradisionalisme Radikal Persinggungan Nahdlatul Ulama-Negara* (Yogyakarta: Pt. LKiS Printing Cemerlang, 1997), hlm 38

mendukung proses pencarian teori. Adapun pengertian kajian pustaka menurut Nyoman Kutha Ratna yang memiliki tiga pengertian yang berbeda.

1. Kajian pustaka adalah seluruh bahan bacaan yang mungkin pernah dibaca dan dianalisis, baik yang sudah dipublikasikan maupun sebagai koleksi pribadi.
2. Kajian pustaka sering dikaitkan dengan kerangka teori atau landasan teori, yaitu teori-teori yang digunakan untuk menganalisis objek penelitian. Oleh sebab itu, sebagai peneliti menggabungkan kajian pustaka dengan kerangka teori.
3. Kajian pustaka adalah bahan-bahan bacaan yang secara khusus berkaitan dengan objek penelitian yang sedang dikaji.¹⁵

Pembahasan mengenai masalah peranan Subchan Zaenuri Echsan dalam menumpas pemberontakan PKI di Jakarta tahun 1965-1970 belum banyak dilakukan. Dengan demikian terdapat beberapa sumber ketetapan yang dapat dinyatakan dalam penelitian, diantaranya adalah sebagai berikut.

1. Buku yang berjudul *Tradisionalisme Radikal Persinggungan Nahdatul Ulama-Negara* tahun terbit 1997 karangan Greg Barton dan Greg Fealy yang membahas tentang NU sebagai bagian penting dari kaum Tradisional, NU yang bertahan dalam arus deras perubahan politik, adaptif menghadapi terpaan modernitas dan tetap otentik dengan tradisionalitasnya.
2. Buku karangan H. Abdul Mun'im DZ yang berjudul *Benturan NU PKI 1948-1965* yang menjelaskan tentang sejarah konflik NU PKI

¹⁵<https://m.mediaindonesia.com> 22 Juli 2022 Pukul 22:57 oleh Anggi Putri Lestari.

dilihat dari sudut pandang NU, menggali dan memaparkan apa yang dialami, difikirkan, dirasakan, dan dilakukan para kiyai, santri dan pimpinan NU dalam menghadapi PKI sebagai kelompok Bughot (Subversif). Dan menjelaskan serangkaian peristiwa panjang sejak tahun 1926 masehi ketika PKI mulai memberontak dan kaitannya dengan pemberontakan PKI di Madiun tahun 1948 masehi.

3. Buku karangan Pusjarah yang berjudul Komunisme di Indonesia, Pemberontakan G30 S/PKI dan penumpasannya (1960-1965). Yang menjelaskan tentang berbagai pergerakan yang dilakukan PKI dari segala hal, mengambil strategi politik untuk mendukung kelompoknya agar PKI tetap bisa melakukan politiknya di Indonesia. Namun adapula yang membantah politik PKI, yakni orang-orang yang anti komunis.

E. Kerangka Pemikiran

Kerangka pemikiran dapat diartikan sebagai suatu rancangan yang digunakan untuk membantu penulis dalam menyelesaikan tulisan yang sudah dibuatnya. Kerangka pemikiran juga sering disebut dengan istilah kerangka berpikir yang dimana biasanya ditulis dalam bentuk bagan dari bagian-bagian penting yang harus dikerjakan terlebih dahulu. Kerangka berpikir atau pemikiran ini bisa digunakan pada karya tulis yang bersifat ilmiah atau karya tulis yang sifatnya non ilmiah. Adapun pengertian kerangka pemikiran menurut beberapa para ahli sebagai berikut:

1. Menurut Sapo Haryoko mengatakan bahwa kerangka berpikir adalah sebuah penelitian yang dimana variabel yang digunakan ada dua atau lebih. Maka dari itu, kerangka berpikir tersebut terdiri dari

beberapa variabel yang kemudian akan dijelaskan dalam penelitian yang akan dilakukan.

2. Menurut Echo kerangka berpikir adalah suatu dasar pemahaman yang akan memengaruhi dasar dari pemahaman orang lain. Oleh karena itu, kerangka berpikir dapat dijadikan sebagai dasar pemikiran yang akan dituangkan ke dalam bentuk penelitian atau dalam bentuk karya tulis.
3. Menurut Polancik mengatakan bahwa kerangka pemikiran adalah suatu diagram yang memiliki peran sebagai alur logika sistematis dari tema yang akan ditulis nantinya. Menurut Polancik, kerangka berpikir ini dibuat berdasarkan pertanyaan-pertanyaan yang akan digunakan pada penelitian. Kemudian, dari pertanyaan-pertanyaan penelitian itu menghasilkan suatu konsep yang saling terhubung, sehingga dapat menggambarkan alur penelitian.¹⁶

Keberhasilan PKI secara politik telah merangsang ambisinya untuk memperbesar dan mempercepat cita-cita politiknya seperti yang diputuskan dalam Kongres Nasional VII bulan April tahun 1962 masehi yang antara lain dikatakan, “PKI tidak memandang pekerjaan dalam parlemen sebagai pekerjaan terpokok dan tidak pula menganggapnya sebagai satu-satunya bentuk perjuangan. PKI mendasarkan politiknya atas analisis Marxis mengenai keadaan yang konkret dan perimbangan kekuatan.” Dari pernyataan itu jelaslah bahwa PKI mulai mengambil ancang-ancang mengimbangi cara parlementer dengan cara lain, yakni cara-cara kekerasan. Untuk memperoleh perimbangan kekuatan, PKI melakukan apa yang mereka sebut sebagai “ofensif manipolis”. Ofensif itu ditingkatkan menjadi “ofensif revolusioner” yang ditujukan kepada

¹⁶<https://www.gramedia.com> 22 Juli 2022 pukul 23.37

semua kekuatan sosial politik yang tidak mereka senangi. Selain itu, PKI berusaha pula merangkul golongan lain yang kiranya dapat dijadikan “kawan”, seperti Partindo (Partai Indonesia) dan menyusupi PNI (Partai Nasional Indonesia) melalui Ir.Surachman, yang ketika itu menjadi Sekjen Dewan Pimpinan Pusat PNI.¹⁷

F. Metodologi Penelitian

Metodologi penelitian yang digunakan dalam penelitian adalah menggunakan metode penelitian sejarah, dalam penelitian melalui beberapa tahap penelitian yakni pemilihan Topik, Heuristik, Kritik sejarah, Interpretasi dan Historiografi.

1. Pemilihan Topik

Pemilihan Topik dipilih berdasarkan pendekatan emosional yaitu suatu usaha untuk menggugah perasaan dan emosi seseorang dalam meyakini, memahami dan menghayati topik yang dibahas dan pendekatan intelektual atau pendekatan SAVI yang diperkenalkan pertama kali oleh Dave Meier. Mengatakan manusia memiliki empat dimensi yakni: tubuh atau somatic (S), pendengaran atau auditori (A), penglihatan atau visual (V), dan pemikiran atau intelektual (I). bertolak dari pandangan ini, ia mengajukan model pembelajaran aktif yang disingkat SAVI yaitu somatic yang bermakna belajar dengan berbuat, auditori yang bermakna belajar dengan berbicara dan mendengarkan, visual yang bermakna belajar dengan mengamati dan menggambarkan serta intelektual yang bermakna belajar dengan berpikir dan

¹⁷ Moerdiono, *Gerakan 30 September Pemberontakan Partai Komunis Indonesia* (Jakarta: Pt. Ghalia Indonesia, 1994), hlm 31

merenung.¹⁸ Pendekatan emosional peneliti memilih topik ini karena tertarik dengan peranan tokoh pemberontakan terhadap PKI ini. Penulis tertarik akan kedekatan intelektual dalam pembelajaran sejarah karena topik yang dibahas juga berkaitan dengan sejarah yang fakta dan benar-benar terjadi.

2. Heuristik

Menurut Notosusanto, Heuristik berasal dari bahasa Yunani Heurikein, artinya sama dengan To Find yang berarti tidak hanya menemukan, tetapi mencari dahulu. Pada tahap ini, kegiatan diarahkan pada penjajakan, pencarian, dan pengumpulan sumber-sumber yang akan diteliti, baik yang terdapat di lokasi penelitian, temuan benda maupun sumber lisan. Adapun tahapan dalam heuristik yaitu menentukan tema atau judul, mencari sumber data sejarah, melakukan kunjungan ke lokasi peristiwa, mengkaji dan menganalisis sumber sejarah, dan menyusun laporan hasil analisis sumber sejarah.¹⁹

Pada tahapan ini penulis mengumpulkan data atau sumber sejarah melalui studi pustaka yang berkaitan dengan judul yaitu Peranan Subchan Zaenuri Echsan Dalam Menumpas Pemberontakan PKI di Jakarta Tahun 1965-1970.

3. Kritik Sejarah

Kritik dilakukan oleh sejarawan jika sumber-sumber sejarah telah dikumpulkan. Tahapan kritik tentu memiliki tujuan tertentu dalam pelaksanaannya. Salah satunya adalah otentitas. Menurut Lucey dalam Sjamsuddin “sebuah sumber sejarah (catatan harian, surat, buku) autentik atau asli jika benar-benar merupakan produk dari orang yang

¹⁸<https://brainly.co.id> 26 Juli 2022 pukul 00.05

¹⁹<https://penerbitbukudeepublish.com> 26 Juli 2022 pukul 00.18

dianggap sebagai pemiliknya (atau dari periode yang dipercayai sebagai masanya jika tidak mungkin menandai pengarangnya). Proses kritik meliputi dua macam, yaitu kritik eksternal dan kritik internal. Nugroho Notosusanto menegaskan “Setiap sumber mempunyai aspek intern dan aspek ekstern”.²⁰

Adapun yang dimaksud kritik intern adalah tahap dalam penelitian sejarah yang bertujuan untuk menguji kredibilitas dan realibilitas dari sumber sejarah. Dalam tahap ini, peneliti melakukan kritik secara kritis terhadap isi dari sumber sejarah. Sedangkan kritik ekstern merupakan kegiatan untuk menguji autentisitas (keaslian) sumber. Kritik ekstern cenderung menguji keaslian sumber sejarah dari bentuk fisiknya.²¹

4. Interpretasi

Interpretasi adalah menguraikan fakta-fakta sejarah dan kepentingan topik sejarah, serta menjelaskan masalah kekinian. Tidak ada masalah dalam konteks sejarah yang aktual karena yang ada hanyalah interpretasi historis. Interpretasi bertujuan melakukan sintesis atas sejumlah fakta yang diperoleh dari sumber sejarah dan bersama dengan teori disusunlah fakta itu dalam interpretasi yang menyeluruh dan karena itu pula, interpretasi atas fakta yang sama sekalipun memungkinkan hasil yang beragam. Disinilah interpretasi sering disebut sebagai penyebab timbulnya subjektivitas.²²

²⁰Sulasman. *Metodologi Penelitian Sejarah* (Bandung: Cv Pustaka Setia, 2013), hlm 93-147

²¹<https://roboguru.ruangguru.com> 26 Juli 2022 pukul 00.38

²²Sulasman. *Metodologi Penelitian Sejarah* (Bandung: Cv Pustaka Setia, 2013), hlm 107

5. Historiografi

Historiografi berasal dari Bahasa Yunani, yaitu *Historia* dan *Grafein*. *Historia* berarti penyelidikan tentang gejala alam fisik (*Physical research*). Sedangkan *Grafein* berarti gambaran, tulisan atau uraian (*description*). Dengan demikian secara harfiah historiografi dapat diartikan sebagai uraian atau tulisan tentang hasil penelitian. Sedangkan menurut istilah historiografi berarti “penulisan sejarah”, dan *historiographer* berarti “sejarawan”. Beranjak dari pemahaman semacam inilah sejarawan-sejarawan resmi dianugerahi gelar “*Historiografer Kerajaan*” di Swedia sejak tahun 1618, Inggris sejak tahun 1660, dan Skotlandia sejak tahun 1681. Jabatan dengan gelar tersebut masih dipertahankan di Skotlandia.

Dewasa ini historiografi didefinisikan sebagai “kajian tentang cara menulis sejarah di masa lampau dan masa kini, yakni sejarah dari karya tulis kesejarahan”, yang berarti jika anda belajar “historiografi”, anda tidak mempelajari kejadian-kejadian masa lampau secara langsung, tetapi mempelajari tafsir yang berubah-ubah terhadap kejadian-kejadian tersebut di dalam karya-karya tulis sejarawan-sejarawan perorangan.²³

G. Sistematika Penulisan

Dalam sistematika penulisan, penulis membagi dalam lima bab yang masing-masing terdapat sub bab diantaranya adalah sebagai berikut:

²³<https://wikipedia.org> 26 Juli 2022 pukul 00.49

Bab Pertama Pendahuluan, meliputi Latar Belakang Masalah, Rumusan Masalah, Tujuan Penelitian, Kajian Pustaka, Kerangka Pemikiran, Metodologi Penelitian dan Sistematika Penulisan.

Bab Kedua, Riwayat Hidup Subchan Zaenuri Echsan, meliputi Silsilah Keturunan Subchan Zaenuri Echsan, Riwayat Pendidikan Subchan Zaenuri Echsan, dan Karya-karya Subchan Zaenuri Echsan.

Bab Ketiga Pemberontakan PKI di Jakarta Tahun 1965-1970, meliputi Awal masuknya PKI di Jakarta, Jalannya Pemberontakan PKI di Jakarta dan Tokoh-tokoh PKI di Jakarta.

Bab Keempat Kontribusi Subchan Zaenuri Echsan dalam Menumpas Pemberontakan PKI di Jakarta Tahun 1965-1970, meliputi Sebagai Ketua KAP-GESTAPU, Sebagai Wakil Ketua MPRS dan Sebagai Front Pancasila.

Bab Kelima Penutup, meliputi Kesimpulan dan Saran-saran.